

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
GLOSARIUM.....	ix
DAFTAR SINGKATAN	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
INTISARI.....	xiv
<i>ABSTRACT</i>	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. <i>Literature Review</i>	6
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Kerangka Teoritis	11
E.1. Akses Terhadap Sumber Daya Hutan	11
E.2. Kontrol Negara Atas Hutan.....	13
E.3. Fragmentasi Sektor Kehutanan	15
F. Definisi Konseptual dan Operasional	18
F.1. Definisi Konseptual.....	18
F.2. Definisi Operasional.....	18
G. Kerangka Pikir.....	19
H. Metode Penelitian.....	20
H.1. Jenis Penelitian	20
H.2. Teknik Pengumpulan Data.....	20

H.3. Analisis Data.....	21
I. Sistematika Penulisan	22
BAB II Rezim Kehutanan Indonesia: Kepengurusan Hutan oleh Negara	24
A. Akses Hutan Negara: Dominansi Negara melalui Institusi Kehutanan	24
B. Era Desentralisasi: Menguatnya Fragmentasi Sektor Kehutanan	28
C. KPH: Unit Pengelola Hutan di Level Daerah	30
C.1. Perubahan Kewenangan atas Hutan Negara di Provinsi DIY	32
C.2. KPH dan Akses Masyarakat melalui HKm.....	38
E. Kesimpulan Bab.....	44
BAB III AKTOR, KEPENTINGAN, DAN ALIRAN KEUNTUNGAN (<i>BENEFIT</i>) ATAS HUTAN NEGARA.....	45
A. Aktor Negara di Hutan Yogyakarta	46
A.1. Dinas Provinsi dan KPH.....	46
A.2. KTH dan LSM	52
B. Kepentingan Masing-Masing Aktor di Hutan Negara	57
B.1. Pemetaan Kepentingan KPH dan Dishutbun DIY	59
B.2. Kepentingan KTH dan LSM	65
C. Aliran Keuntungan (<i>Benefit</i>) atas Hutan Negara.....	67
C.1. Aliran Keuntungan (<i>Benefit</i>) KPH dan Dishutbun DIY	67
C.2. Aliran Keuntungan (<i>Benefit</i>) KTH.....	74
D. Kesimpulan Bab	76
BAB IV MEKANISME AKTOR DALAM MEMPEROLEH, MENGONTROL, MENJAGA AKSES DAN ALIRAN KEUNTUNGAN (<i>BENEFIT</i>).....	78
A. Mekanisme Akses Berbasis Legal.....	79
B. Mekanisme Akses Berbasis Struktur dan Relasi	82
C. Kesimpulan Bab	90

BAB V PENUTUP.....	92
A, KESIMPULAN	92
B. REFLEKSI TEORITIS.....	95
DAFTAR PUSTAKA	98

GLOSARIUM

Blok Tebangan	: Kumpulan dari petak-petak yang akan ditebang
Bidang RPH	: Bidang Rehabilitasi dan Produksi Hutan dibawah Dishutbun Provinsi
Hutan Produksi (HP)	: Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan
Hutan Lindung (HL)	: Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan secara ekologis
Hutan Kemasyarakatan	: Wujud dari program Kehutanan Sosial
Inventarisasi Hutan/ <i>Cruising</i>	: Pengukuran Potensi Tegakan Hutan
ICCTF	: <i>Climate Change Trust Fund</i> . Lembaga donor internasional di bidang pengurangan emisi karbon
Kehutanan Sosial/ <i>Social Forestry</i>	: Konsep Kehutanan yang tidak menitikberatkan pada kayu saja
Kesatuan Pengelolaan Hutan	: Unit Pengelolaan Teknis Kehutanan di tingkat terkecil (tapak)
Kelompok Tani Hutan	: Kelompok masyarakat yang memperoleh ijin pemanfaatan hasil hutan
MFP	: <i>Multi-stakeholder Forestry Programme</i> . Lembaga donor internasional di bidang kehutanan
<i>Over Cutting</i>	: Penebangan yang melebihi syarat minimum jumlah tebangan yang telah ditentukan
Perhutanan Sosial	: Wujud program Kehutanan Sosial oleh Perhutani
Petak	: Unit terkecil dalam pengelolaan hutan
Provisi Sumber Daya Hutan	: Pajak kehutanan di Hutan Kemasyarakatan, Hutan Rakyat, dan HPH swasta

RKU	: Rencana Kerja Umum (10 tahunan) dalam bentuk dokumen
RKT	: Rencana Kerja Tahunan (1 tahunan) dalam bentuk dokumen
RKO	: Rencana Kerja Operasional (1 bulanan) dalam bentuk dokumen
Tanaman Pokok	: Jenis tanaman dominan dan menjadi tujuan pengelolaan
Tumpangsari	: Tanaman semusim yang di tanam di bawah tegakan pohon

DAFTAR SINGKATAN

BDH	: Bagian Daerah Hutan
BPHPKP	: Bagian Pengelolaan Hutan Produksi Kayu Putih
BPDAS	: Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
CBFM	: <i>Community Based Forest Management</i>
Dephut	: Departemen Kehutanan
Dishutbun Provinsi	: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi
Dishutbun Kabupaten	: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten
HPH	: Hak Pengusahaan Hutan
HKm	: Hutan Kemasyarakatan
IUPHHK	: Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
IUPHHBK	: Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu
IUPHHKm	: Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kemasyarakatan
KLHK	: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
KTH	: Kelompok Tani Hutan
KPH	: Kesatuan Pengelolaan Hutan
KPHP	: Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi
KPHL	: Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung
KPHK	: Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi
LHP	: Laporan Hasil Penebangan
LHC	: Laporan Hasil <i>Cruising</i>
NSPK	: Norma, Standar, Prosedur, Kriteria
PHBM	: Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat
Perhutani	: Perusahaan Hutan Negara Indonesia
RPH	: Resort Pengelolaan Hutan
SDH	: Sumber Daya Hutan
Tahura	: Taman Hutan Raya
UPTD	: Unit Pelaksana Teknis Daerah

DAFTAR TABEL

1. Jenis Tugas Pokok dan Fungsi antara Balai KPH dan Dinas Provinsi, Kabupaten/Kota	35
2. Potensi Tanaman Kayu Jati dan Akasia	43
3. Penetapan Wilayah Kerja BDH dan BPHPKP Kabupaten Gunung Kidul	47
4. Kepentingan Aktor / Institusi dalam Memperoleh, Menjaga, dan Mengontrol Akses	60
5. Data Perkembangan Penetapan Wilayah KPHP dan KPHL	64
6. Aliran Keuntungan (<i>Benefit</i>) dari KPH dan Dishutbun Yogyakarta.....	73
7. Mekanisme Berbasis Akses dan Legal (<i>Law</i>)	81
8. Mekanisme Akses Berbasis Struktural dan Relasi (KPH)	83
9. Mekanisme Akses Berbasis Struktural dan Relasi (Dishutbun Provinsi)	89

DAFTAR GAMBAR

1. Kerangka Pikir Penelitian	19
2. Peta Areal Kerja HKm Sedyo Makmur.....	42
3. Posisi KPH dalam Struktur Dishutbun Provinsi DIY	51
4. Peta Kawasan KPH Provinsi DIY	61